



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2024 yang terdiri atas:

- a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, proyek prioritas strategis (*major project*), kegiatan tematik, dan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. matriks Renja KKP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian *major project* dan prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi eselon I tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

KEDUA : Renja KKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2024.

KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.

KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP Tahun 2024 setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2024

A. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. RKP Tahun 2024 akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025 – 2045. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2024 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. 7 (tujuh) PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Pencapaian tujuh PN tersebut didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam

pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

dalam rpjmn tahun 2020-2024 terdapat 41 (empat puluh satu) mp yang kemudian berkembang menjadi 43 (empat puluh tiga) mp pada rkp tahun 2021. dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada rkp tahun 2022 jumlah mp kembali dikembangkan menjadi 45 (empat puluh lima) dan tetap dipertahankan pada rkp tahun 2024. penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 (empat puluh lima) mp disampaikan dalam bab iv pada masing-masing pn. dalam pelaksanaannya kkp terlibat penuh pada 3 (tiga) mp yaitu:

1. penguatan jaminan usaha serta 350 (tiga ratus lima puluh) korporasi petani dan nelayan;
2. revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; dan
3. integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional.

Tahun 2024 merupakan tahun penghujung RPJMN 2020-2024 dan menjadi tahun terakhir mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi tahun penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Tahun 2024 juga merupakan tahun politik, tahun pelaksanaan Pemilu dan masa transisi serta menjadi tahun landasan awal untuk penyusunan RPJMN 2025-2029.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen RKP tahun 2024 akan ditekankan pada pengembangan wilayah yang ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020-2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";

3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020–2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020–2024 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2024
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks kesejahteraan masyarakat KP (indeks)	63,87
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<80
		3.	Luas kawasan konservasi (juta ha)	29,3
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4.	Pertumbuhan produk domestik bruto (persen)	5-7
		5.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,2
		6.	Konsumsi ikan (Kg/kapita/thn)	59,00
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM	7.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia	72

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2024
	kelautan dan perikanan meningkat		usaha dan dunia industri/DUDI (persen)	
5.	Tata kelola SDKP bertanggung jawab	8.	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPPNRI)	11
		9.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	10.	Produksi perikanan (juta ton)	30,85
		11.	Produksi garam (juta ton)	2
		12.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (persen)	99
		13.	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (triliun rupiah)	10,85
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	14.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan (persen)	98
8.	Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas	15.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	80
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	93,76

Selain itu, target nilai PNPB sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 adalah sebesar Rp4.465.989.755.000,00 (empat triliun empat ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan target jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 adalah sebanyak 489.211 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sebelas) orang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis KKP pada Tahun 2024, maka KKP akan melakukan penyesuaian pada tugas dan fungsi pokok seluruh unit organisasi di Lingkungan KKP. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP dengan susunan organisasi sebagai berikut:

NO	SEMULA	MENJADI
1	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	SEMULA	MENJADI
7	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
8	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
9	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

C. Program Tahun 2024

Program pada tahun 2024 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Nomenklatur program KKP tahun 2024 beserta sasaran program, indikator sasaran program, target, dan satuan sebagai berikut:

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-SDM KP peserta diklat yang terserap di dunia usaha dan dunia industri	01-Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri	72	persen
	02-SDM KP peserta diklat yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	01-Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	392	orang
	03-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	01-Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	3.000	kelompok
		02-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	2.000	kelompok
	04-Iptek hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat	01-Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (desa perikanan cerdas)	15	desa
05-Sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya	01- Sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya	53	unit	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Produk olahan KP berdaya saing	01-Volume produk olahan KP berdaya saing	7,50	juta ton
	02-Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	01-Kebertarikan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	140	negara
		02-Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	99	persen
		03-Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	80	lokasi
		04-Nilai ekspor hasil perikanan	7,2	USD miliar
		05-Konsumsi ikan	59,00	kg/kapita/tahun
03-Kesejahteraan pengolah hasil perikanan meningkat	01-Nilai tukar pengolah hasil perikanan	104,75	indeks	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	01-Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	17,8	juta ha
		02-Luas kawasan konservasi	29,3	juta ha
	02-Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	01-Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	20	jenis
	03-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	01-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	70	lokasi
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	01-Kesejahteraan Nelayan Meningkat	01-Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110	indeks
	02-Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	01-Nilai tukar pembudidaya ikan	105	NTPI
		02-Pendapatan pembudidaya	4.800.000	rupiah
	03- Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	01-Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	80	indeks
	04-Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	01- Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	74	nilai
02- Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP		89	indeks	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	05-Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	01- Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100	persen
		02- Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	91	indeks
		03- Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	81	indeks
		04- Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	80	indeks
	06-Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	01-Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan	86	indeks
	07-Kesejahteraan petambak garam meningkat	01-Nilai tukar petambak garam	101,75	indeks
	08- Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	01-Nilai investasi kelautan dan perikanan	9	triliun rupiah
		02-Kinerja logistik hasil perikanan	71,9	indeks
		03-Pembiayaan usaha KP melalui kredit program	10,26	triliun rupiah
		04-Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,65	indeks
		05-Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90	persen
		06-Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan Indonesia/total impor yang masuk)	100	persen
07-Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan		81	persen	
09-Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi	4	ragam	
	02-Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana dan prasarana dan/atau dimanfaatkan	11	kawasan	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		02-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kelautan	1,70	triliun rupiah
	10-Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	01-Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	≤80	persen
	11-Produktivitas perikanan budidaya meningkat	01-Produksi perikanan budidaya	24,85	Juta ton
	12- Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan	21	kawasan
		02-Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut	100	persen
	13-Poduktivitas dan usaha garam nasional meningkat	01-Produksi garam	2,0	juta ton
	14-Terkelolanya kawasan wisata bahari	01-Kawasan wisata bahari	10	kawasan
	15-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	01-Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	7	komunitas
	16-Perumusan kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	01-Hasil perumusan kebijakan responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	8	Rekomendasi kebijakan
WA-Program Dukungan Manajemen	01-Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah di lingkungan KKP	01-Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan KKP	≤ 0,5	persen
		02-Tingkat maturitas SPIP KKP	3	nilai
		03-Unit kerja KKP berpredikat menuju WBK	106	unit
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP KKP	84	nilai
		05-Nilai integritas KKP	80,5	nilai
		06-Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	82	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		prioritas/strategis di lingkungan KKP		
		07-Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN di lingkungan KKP	82	persen
		08-Tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP	82	persen
		09-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan KKP	80	persen
	02-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan efektif	01-Tingkat kapabilitas ITJEN	3,5	level
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup ITJEN	85	persen
		03-Unit kerja ITJEN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
		04-Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup ITJEN	86	persen
		05-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ITJEN	93,76	nilai
		06-Nilai kinerja anggaran ITJEN	86	nilai
		07-Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP	18	rekomendasi
		08-Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup ITJEN	89	persen
		09-Persentase kepatuhan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan lingkup ITJEN	80	persen
		10-Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan ITJEN	4,16	indeks
	03-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSDKP	01-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang Pengawasan SDKP	70	indeks
		02-Unit kerja berpredikat menuju	15	unit

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		WBK di Lingkup Ditjen PSDKP		
		03-Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	82	indeks
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	84	nilai
		05-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PSDKP	76	nilai
		06-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen PSDKP	≤ 0,5	persen
		07-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP	3,3	nilai
		08-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen PSDKP	80	persen
		09-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PSDKP	80	persen
		10-Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
		11-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP	80	persen
		12-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP	93,76	nilai
		13-Nilai kinerja anggaran Ditjen PSDKP	86	nilai
	04-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDSPKP	01-Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkup Ditjen PDSPKP	2	unit
		02- Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen PDSPKP	≤ 0,5	persen
		03-Indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	80	indeks
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP	84	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	3,3	nilai
		06-Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan manajemen	94	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		pengetahuan terstandar		
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	80	persen
		08- Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PDSPKP	76	persen
		09- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PDSPKP	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP	86	nilai
		11-Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP	80	persen
		12-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP	80	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP	80	persen
		14-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP	91	persen
	05-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal	01-Nilai RB KKP	80	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN KKP	85	Indeks
		03-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	87,5	Indeks
		04-Nilai kinerja anggaran KKP	86	nilai
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	75	nilai
		06-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP	94	persen
		07-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal	≤ 0,5	Persen
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	80	persen
		09-Unit kerja berpredikat menuju WBK Lingkup Sekretariat Jenderal	5	unit

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		10-Persentase pencapaian target PNPB layanan LPMUKP	97	nilai
		11-Persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	90	nilai
	06-Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL	01-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PRL	88	indeks
		02-Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PRL	8	unit kerja
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen PRL	≤ 0,5	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PRL	84	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PRL	3,3	level
		06-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PRL	92	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL	80	persen
		08-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PRL	76	persen
		09-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PRL	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran Ditjen PRL	86	nilai
		11-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PRL	80	persen
		12-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PRL	80	persen
		13-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PRL	80	persen
		14-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PRL	91	persen
		15-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL	12	bulan
	07-Tata kelola pemerintahan	01-Tingkat efektivitas pelaksanaan program	80	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya		
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	85	indeks
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Budidaya	≤ 0.5	persen
		04-Nilai penilaiain mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya	82	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budidaya	3.3	nilai
		06-Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budidaya yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar	94	persen
		07-Unit kerja berpredikat menuju WBK di Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	14	unit kerja (kumulatif)
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		09-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Budidaya	76	persen
		10-Indikator kinerja pelaksana anggaran Ditjen Perikanan Budidaya	93,76	nilai
		11-Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	86	nilai
		12-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		14-Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	90	persen
08-Tata Kelola Pemerintahan	01-Unit kerja berpredikat menuju	16	unit	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	yang Baik di Lingkungan BRSDM	WBK Lingkup BRSDM (kumulatif)		
		02-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan BRSDM	≤ 0.5	persen
		03-Indeks profesionalitas ASN BRSDM	79	indeks
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP BRSDM	77	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BRSDM	3,3	nilai
		06-Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRSDM	80	persen
		08-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BRSDM	76	persen
		09- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BRSDM	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran BRSDM	86	nilai
		11-Tingkat kepatuhan BMN BRSDM	80	persen
		12- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BRSDM	80	persen
		13-Pendidikan dan pelatihan aparatur	5.423	orang
09-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM		01-Indeks profesionalitas ASN BKIPM	86	indeks
		02-Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkup BKIPM	29	unit kerja
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan BKIPM	≤ 0,5	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM	84	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BKIPM	3,3	nilai
		06-Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar	94	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		07- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM	80	persen
		08- Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BKIPM	76	persen
		09- Indikator kinerja Pelaksanaan anggaran BKIPM	93,76	persen
		10- Nilai kinerja anggaran BKIPM	86	nilai
		11- Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BKIPM	80	persen
		12- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup BKIPM	80	persen
		13- Tingkat kepatuhan BMN BKIPM	80	persen
	10- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	01- Penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	84	nilai
		02- Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	3,3	nilai
		03- Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	15	unit
		04- Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	persen

D. Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan pada tahun 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Nomenklatur kegiatan KKP pada tahun 2024 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2375- Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan	01- Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	35.173	orang
	02- Terselenggaranya sertifikasi SDM kelautan dan perikanan	01- Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi	1.450	orang
	03- Terselenggaranya kaji terap pelatihan KP	01- Kajian inovasi yang diterapkan untuk pelatihan kelautan dan perikanan (Kaji Terap)	8	kajian

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	04-Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang disuluh	47.000	kelompok
	05-Terselenggaranya percontohan penyuluhan KP	01-Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan	49	kelompok masyarakat
	06-Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Jumlah sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	11	unit
	07-Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan dan penyuluhan KP	01-Jumlah norma, standar, prosedur dan kreteria pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	8	NSPK
2376- Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	8.020	orang
	02-Terselenggaranya pengabdian pendidikan tinggi KP	01-Jumlah pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan	14	kelompok masyarakat
	03-Terselenggaranya kajian pendidikan tinggi KP	01-Jumlah penelitian terapan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	23	kajian
	04-Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	01-Jumlah peralatan dan mesin pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	21	unit
		02-Jumlah prasarana pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	9	unit
		03-Jumlah prasarana pendidikan menengah kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	3	unit
		04-Jumlah sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	9	unit
	05-Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendidikan KP	01-Jumlah NSPK pendidikan kelautan dan perikanan	5	NSPK

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2357- Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya promosi pemasaran produk perikanan	01-Promosi gemarikan yang dilaksanakan	185	promosi
		02-Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri oleh daerah	38	promosi
		03-Promosi skala internasional yang dilaksanakan	6	promosi
		04-Promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri	4	promosi
	02-Terbangunnya prasarana pemasaran kelautan dan perikanan	01-Prasarana pemasaran kelautan dan perikanan yang dibangun	13	unit
	03-Tersedianya bantuan peralatan/sarana pemasaran	01-Peralatan pemasaran yang disediakan	6.000	unit
		02-Kendaraan pemasaran alih teknologi informasi yang disediakan	2	unit
	04- Terselenggara nya pembinaan dan pengelolaan pasar ikan	01-Lokasi pembinaan pengelolaan pasar ikan	100	lembaga
	05-Tersedianya sistem informasi pemasaran	01-Sistem informasi bursa pasar ikan yang dibangun	1	sistem informasi
	06-Terfasilitasi nya forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor	01-Forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor yang di fasilitasi	3	forum
	07-Tersedianya data dan informasi publik bidang pemasaran hasil KP	01-Profil pasar ekspor hasil kelautan perikanan	4	data
		02-Profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan`	4	data
	08-Terselenggara nya pendampingan <i>major project</i> pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	01-Kegiatan pendampingan <i>major project</i> pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	1	dokumen
2358- Pengolahan dan Bina Mutu Produk	01-Terlaksananya sertifikasi produk KP	01-Produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat	10.000	produk

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Kelautan dan Perikanan		<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>		
	02-Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP	01-Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina	2.675	UMKM
	03-Terlaksananya UPI skala menengah dan besar yang dibina	01-UPI skala menengah dan besar yang dibina	500	industri
		02-Industri pengolahan yang dibina oleh Daerah	2.340	industri
	04-Tersedianya sarana sistem rantai dingin hasil KP	01-Sarana sistem rantai dingin hasil KP yang disediakan	448	unit
	05-Tersedianya sarana pengolahan hasil KP	01-Sarana pengolahan hasil KP yang disediakan	279	unit
	06-Tersedianya sarana pengolahan MP korporasi	01-Sarana pengolahan MP korporasi yang disediakan	8	unit
	07-Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk KP	01-Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu	1	unit
	08-Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk KP	02-Profilling industri pengolahan hasil perikanan	3	data
	09-Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang disediakan	01-RSNI hasil KP yang disediakan	15	produk
3989- Pengendalian Mutu	01-Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	01-Dokumen harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	8	dokumen
		02-Dokumen registrasi UPI ke negara mitra dan atau negara tujuan ekspor	20	dokumen
		03-Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	95	persen
		04-Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	80	lokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	500	UPI
		06-Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan wilayah RI	100	persen
		07-Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	persen
		08-Jumlah Sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	3.000	sertifikat
		09-Keberterimaan produk di negara tujuan ekspor	140	negara
		10-Jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik pada suplier hasil perikanan	300	sertifikat
		11-Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	25	lokasi
5279- Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya standarisasi produk melalui penyusunan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia serta sertifikasi dan pengujian produk KP	01-Jumlah bahan RSNI yang disediakan	5	produk
		02-Jumlah produk kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji	500	produk
	02-Terlaksananya pembinaan usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui inkubasi bisnis dan pendampingan teknologi	01-Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	55	UMKM
		02-Pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	45	UMKM
	03-Terselenggara nya diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan	01-Orang yang menerima diseminasi dan diversifikasi produk KP	1.000	orang

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2362-Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	01-Terwujudnya kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat nasional dan daerah	01-Luas kawasan konservasi baru	200.000	Ha
	02-Tertatanya kawasan konservasi yang operasional	01-Luas kawasan konservasi yang operasional (kumulatif)	17.800.000	Ha
	03-Terkelolanya keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	01-Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan	20	jenis
	04-Termanfaatkannya kawasan konservasi secara berkelanjutan	01-Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)	17.800.000	Ha
	05-Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut	01-Jejarang, kemitraan, kerja sama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan	13	kerja sama
		02-Kelompok penggerak konservasi yang mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut	20	kelompok
06-Termanfaatkannya keanekaragaman hayati perairan yang dikelola secara berkelanjutan	01-Keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	9	jenis	
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Terwujudnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	01-Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	7	kawasan
	02-Terwujudnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01-Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	4	lokasi
		02-Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau	100	ha

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		kecil yang direhabilitasi		
	03-Terwujudnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	01-Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	49	kawasan

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2337- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	01-Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar	15	persen
	02-Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi	01-Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi	15	persen
	03-Pemanfaatan hasil pengembangan penangkapan ikan yang berdaya saing	01-Persentase hasil pengembangan penangkapan ikan yang dimanfaatkan	72	persen
2338- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	01-Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	01-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	15	persen
	02- Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	01- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi	100	persen
	03-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing	01-Tingkat operasional pelabuhan perikanan	78,5	persen
2339- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	01-Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	01-Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan	100	persen
	02-Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing	01-Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing	100	persen
	03-Pengelolaan sarana pemungutan PNBP pasca produksi	01-Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	04-Korporasi nelayan yang dikembangkan	01-Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan	15	korporasi
2341- Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	01-Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	100	persen
		02-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	100	persen
		03-Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI	100	persen
	02-Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	01-Persentase jumlah WPPNRI perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	84	persen
2344- Pengelolaan Perbenihan Ikan	01-Terkelolanya sistem perbenihan ikan yang berkelanjutan	01-Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	120	unit
		02-Produksi induk unggul untuk bantuan dan operasional UPT	1.061.157	ekor
		03-Bantuan benih ikan air tawar, payau dan laut yang disalurkan ke masyarakat	86.090.065	ekor
		04-Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	150	lembaga
		05-Pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan	3	unit
		06-Kebijakan tata kelola bidang perbenihan	8	rekomendasi kebijakan
		07-Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	26.300	kg
		2345- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	01-Terkelolanya sistem kawasan dan kesehatan ikan yang berkelanjutan	01-Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
02-Sampel monitoring residu dan monitoring penyakit ikan yang diuji	5.490			sampel
03-Sarana kawasan perikanan budidaya	96			unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		yang disalurkan ke masyarakat		
		04-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	10	unit
		05-Klaster kawasan tambak udang dan bandeng yang dikembangkan	10	unit
		07-Prasarana produksi di UPT yang direhabilitasi dan ditingkatkan	5	unit
		08-Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	unit
		09-Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang kawasan dan kesehatan ikan	9	rekomendasi kebijakan
2346- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	01-Terkelolanya sistem produksi dan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan	01- Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	1.070	unit
		02- Konferensi dan event perikanan budi daya	16	kegiatan
		03- Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan	2	unit
		04- Usaha pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan (MP Korporasi)	15	kelompok masyarakat
		05- Unit budidaya yang dibina penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB)	1	lembaga
		06- Bantuan premi asuransi usaha perikanan budi daya yang disalurkan	500	orang
		07- Perizinan usaha perikanan budi daya yang diterbitkan	50	lembaga
		08- Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi	3000	orang
		09- Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha	7	rekomendasi kebijakan
2350- Pemantauan, Operasi	01- Terselenggaranya sistem	01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	81	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
Armada dan Infrastruktur Pengawasan	pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	02- Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	81	nilai	
		02- Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang Akurat	01-Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP	81	indeks
			02- Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	81	indeks
			04-Tingkat pemahaman peserta bimtek bidang pemantauan SDKP	80	nilai
	03- Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan yang efektif	01-Indeks kinerja operasi pesawat patroli	94	indeks	
		02-Indeks kinerja operasi kapal pengawas	91	indeks	
		03-Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	91	indeks	
		04-Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	100	persen	
		05-Indeks kesiapan awak kapal pengawas	72	indeks	
		06-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP	100	persen	
		04- Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	persen
	02-Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP		100	persen	
	03-Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP		81	nilai	
	04-Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP		81	nilai	
	05-Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP		100	persen	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		06-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	100	persen
		07-Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada	1	inovasi
2351- Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	indeks
		02-Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif	80	indeks
		03-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	indeks
		04-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	indeks
		05-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	80	indeks
	02-Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas negara lain secara ilegal	01-Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	74	nilai
	03-Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	01-Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	93	indeks
		02-Indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	70	indeks
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	70	indeks
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen	100	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan		
		05-Persentase penyelesaian rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	indeks
		06-Tingkat pemahaman peserta bimtek bidang penanganan pelanggaran	78	nilai
		07-Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1	inovasi
2352- Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	01-Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	81	nilai
		02-Nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	81	nilai
		03-Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	60	persen
		04-Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional	80	nilai
		05-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDK	80	nilai
		06-Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	80	persen
		07-Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	75	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK)	100	nilai
		09-Tingkat pemahaman peserta bimtek bidang pengawasan pengelolaan SDK	78	nilai
		10-Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK	1	inovasi
	02-Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	01-Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	74	nilai
	03-Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	01-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan	80	persen
		02-Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	persen
2353- Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan NTN perikanan yang sesuai ketentuan	01-Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	80	persen
		02-Nilai penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan	81	nilai
		03-Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	60	persen
		04-Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional	80	Persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP	80 (Pusat) 70 (Dekonsentrasi)	nilai
		06-Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO)	75	nilai
		07-Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan	80	persen
		08-Persentase penyelesaian bahan rancangan NSPK bidang pengawasan SDP	100	persen
		09-Tingkat pemahaman peserta bimtek bidang Pengawasan Pengelolaan SDP	78	nilai
		10-Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP)	1	inovasi
	02-Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	01-Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	74	nilai
	03- Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	01-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan	80	Persen
		02-Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	100	persen
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	01-Jumlah rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas yang disediakan	5	rekomendasi kebijakan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	01-Jumlah kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	29	kesepakatan
	03-Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	01-Jumlah Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan	15	unit
	04-Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	01-Jumlah sarana penyimpan produk KP yang disediakan	5	unit
	05-Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP MP koperasi	01-Jumlah sarana distribusi logistik produk KP (MP Koperasi)	5	unit
	06-Tersedianya prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton	01-Prasarana pendukung operasional gedung beku 1000 ton yang dibangun	4	unit
	07-Terbinanya lembaga pengelola gedung beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang	01-Lembaga pengelola gedung beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang yang dibina	10	lembaga
	08-Terbinanya lembaga pengelola logistik ikan dalam rangka penataan rantai pasok	01-Jumlah lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	8	lembaga
	09-terfasilitasinya lembaga pengelola kapal pengangkut mendukung hasil perikanan	01-Jumlah lembaga pengelola kapal pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik hasil perikanan	8	lembaga
	10-Terimplemen tasikannya Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	01-Jumlah implementasi STELINA	1	unit
	11-Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	01-Jumlah data dan informasi logistik hasil KP	4	data
	12-Tersedianya sarana pendukung operasional gedung beku	01-Jumlah sarana pendukung operasional gedung beku yang disediakan	287	unit
2360- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya promosi usaha dan investasi	01-Promosi usaha dan investasi KP yang dilaksanakan	4	promosi
	02-Terlaksananya fasilitasi dan Pembiayaan Usaha	01-UMKM KP yang difasilitasi pembiayaan usaha	3565	UMKM

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	03-Terlaksananya fasilitas dan pembinaan lembaga usaha KP	01-Jumlah lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	45	lembaga
	04-Jumlah dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	01-Jumlah dokumen Peluang Investasi yang <i>ready to offer</i>	4	dokumen
2363- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01-Terkelolanya lahan garam	01-Lahan garam yang terfasilitasi	75	ha
	02-Terbangunnya sarana niaga garam rakyat	01-Sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	25	unit
		02- sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun	6	unit
	03-Terkelolanya biofarmakologi	01-Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	2	unit
	04-Termanfaatkannya pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	01-Lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	3	lokasi
	05-Terbangunnya sarana prasarana wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	01-Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari	8	kawasan
		02-Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola	2	kawasan
	06-Terfasilitasi pengelolaan reklamasi dan perizinan perairan	01-Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	5	lokasi
		02-Kawasan yang terfasilitasi perizinan perairan	5	lokasi
2365- Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	01-Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasaranannya	3	kawasan
	02-Terwujudnya komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	01-Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	7	komunitas
	03-Terkelolanya dan/atau terfasilitasi pemanfaatan	01-Pulau-pulau kecil/terluar yang dikelola dan/atau difasilitasi pemanfaatannya	8	pulau

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	pulau - pulau kecil/terluar			
2366-Perencanaan Ruang Laut	01-Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Pemanfaatan ruang laut	50	lokasi
		02-Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang diselesaikan	34	lokasi
	02-Tersusunnya perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir	01-KSN dan KSNT yang memiliki materi teknis KSN dan KSNT PPKT serta rencana zonasi KSNT non PPKT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan	7	kawasan
		02-Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	10	provinsi
		03-Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi kawasan antar wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	3	perairan laut
		04- Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	dokumen
3988-Karantina Ikan	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	01-Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan	95	persen
		02-Pemetaan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi	86	lokasi
		03-Persentase pencegahan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	90	persen
		04-Unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	800	unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan impor media pembawa HPIK	100	persen
3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	01-Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	01-Jumlah metode dan/atau parameter uji yang dihasilkan oleh labolatorium acuan RSNI dan standar metode, uji profisiensi, validasi metode, kit diagnostik dan kontrol positif)	77	parameter
		02-Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM	50	parameter
		03-Unit kerja yang dievaluasi dalam penerapan standar metode pengujian	21	unit kerja
		04-Unit kerja yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengujian parameter <i>destructive fishing</i>	7	unit kerja
		05-Tingkat keberhasilan pengawasan di perbatasan	74	persen
		06-Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (<i>Official Control</i>) lingkup otoritas kompeten	50	unit kerja
		07-Jumlah UPT BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi	7	unit kerja
		08-Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	400	lokasi
		09-Inovasi pelayanan publik BKIPM yang lolos seleksi administrasi kompetensi inovasi layanan publik	3	inovasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		10-Persentase unit kerja/UPT yang memperoleh nilai kepuasan masyarakat secara elektornik.	100	persen
		11-Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pengelolaan anggota jaringan laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor kelautan dan perikanan	1	dokumen
		12-Jumlah kebijakan teknis standardisasi sistem dan kepatuhan, perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu	1	kebijakan
5747- Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	01-Terkelolanya sistem pakan dan obat ikan yang berkelanjutan	01-Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	40	unit
		02-Sampel pakan ikan yang diuji	470	sampel
		03-Sertifikat pakan dan obat ikan yang diterbitkan	52	lembaga
		04-Pakan dan obat ikan yang diregistrasi	150	produk
		05-Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang pakan dan obat ikan	8	rekomendasi kebijakan
		06- Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT	950.000	unit
		07-Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan	1	unit
6706-Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan	01-Jumlah rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan	8	rekomendasi kebijakan

5. Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2322-Legislati, Litigasi dan Kerja Sama	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penyiapan produk hukum KKP	01-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		02-Persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan KKP yang Ditangani	100	persen
		03-Persentase permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di lingkungan KKP yang ditangani	100	persen
		04-Persentase perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani	100	persen
		05-Persentase instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum	100	persen
		06-Nilai kinerja pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) KKP	99	nilai
		07-Indeks reformasi hukum KKP	80	nilai
		08-Indeks kualitas kebijakan	65	indeks
	02-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	01-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Hukum	83	indeks
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Hukum	100	persen
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Hukum	95	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Hukum	84	nilai
		05-Persentase penyerapan anggaran Biro Hukum	95	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		undangan bidang KP			
		07-Persentase unit kerja Biro Hukum yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen	
2323- Pengelolaan Organisasi dan SDM	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di pengelolaan SDM aparatur	01-Persentase penyederhanaan struktur organisasi	100	persen	
		02-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	5	nilai	
		03-Indeks profesional ASN Sekretariat Jenderal	84	indeks	
		04-Nilai sistem merit KKP	393	nilai	
		05-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	4	kategori	
		06-Indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN KKP	72	indeks	
		07-Indeks pembinaan jabatan fungsional KKP	72	indeks	
		08-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	62	nilai	
		09-Indeks BerAHKLAK KKP	67	indeks	
		10-Rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional daerah	80	persen	
		11-Indeks penerapan manajemen talenta	90	indeks	
		02-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO	01-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju WBK	75	nilai
			02-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro SDMAO	83	indeks
	03-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro SDMAO		100	persen	
	04-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang		100	persen	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro SDMAO		
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro SDMAO	84	nilai
		06-Persentase penyerapan anggaran Biro SDMAO	95	persen
		07-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan SDMAO	100	persen
		08-Persentase unit kerja Biro SDMAO yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
2325- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan perencanaan, penganggaran dan kinerja	01-Nilai SAKIP KKP	84	nilai
		02-Persentase proyek PHLN yang berstatus at risk	<50	persen
		03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri yang teregister	95	persen
		04-Capaian IKU KKP	72	persen
		05-Capaian prioritas nasional KKP	93	persen
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	1,8	nilai
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	83	persen
		08-Indeks perencanaan pembangunan nasional KKP	84	indeks
		09-Nilai penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Jenderal	84	nilai
		10-Persentase kesesuaian rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra	72	persen
	02-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama antar lembaga	01-Persentase kontribusi kerja sama bidang kelautan dan perikanan terhadap program prioritas	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		02-Persentase naskah kerja sama yang disetujui pimpinan para pihak	95	persen
	03-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	01-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju WBK	75	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Perencanaan	83	indeks
		03-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Perencanaan	100	persen
		04-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan	100	persen
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Perencanaan	84	nilai
		06-Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan	95	persen
		07-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerjasama antar lembaga	100	persen
		08-Persentase unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
	04-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN	01-Opini BPK atas laporan keuangan KKP	WTP (5)	opini
		02-Indeks pengelolaan aset KKP	3,35	indeks
		03-Indeks pengelolaan keuangan KKP	0,67	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Tingkat kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal	82,5	persen
		05-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP	93,76	nilai
		06-Nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal	86	nilai
		07-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal	≤ 0.5	persen
		08-Tingkat maturitas SPIP KKP	3	level
		09-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	80	persen
		10-Nilai pengelolaan PNPB sektor kelautan dan perikanan	100	persen
	05-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan	01-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Keuangan	83	indeks
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Keuangan	100	persen
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan	95	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Keuangan	84	nilai
		05-Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan	95	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan BMN	100	persen
		07-Persentase unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan sistem manajemen	94	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		pengetahuan yang terstandar		
2328- Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi, informasi publik	01-Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	89,5	nilai
		02-Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85,5	nilai
		03-Nilai keterbukaan informasi publik	92	nilai
		04-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89	persen
		05-Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan KKP	88	nilai
	02-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional	01-Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95	persen
		02-Nilai kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	85	nilai
		03-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	95	persen
		04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	95	persen
	03-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	01-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro HKLN	83	indeks
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro HKLN	100	persen
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro HKLN	84	nilai	
		05-Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN	95	persen	
		06-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju WBK	75	nilai	
		07-Persentase unit kerja Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen	
		04-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, pengadaan barang/jasa dan ketatausahaan pimpinan	01-Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KKP	80	nilai
			02-Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	nilai
			03-Persentase pelaksanaan layanan pimpinan	88	persen
	04-Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat		85	indeks	
	05-Tingkat digitalisasi arsip KKP		81	persen	
	05-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Umum dan PBJ	01-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Umum dan PBJ	85	Indeks	
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Umum dan PBJ	100	persen	
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum dan PBJ	100	persen	
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ	84	nilai	
		05-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Biro Umum dan PBJ	93,76	persen	
		06-Nilai kinerja anggaran Biro Umum dan PBJ	86	Nilai	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		07-Persentase unit kerja Biro Umum dan PBJ yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
2329- Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan data dan informasi KP	01-Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	91	persen
		02-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Sekretariat Jenderal	94	persen
		03-Indeks layanan aplikasi sistem informasi	4	indeks
		04-Tingkat kematangan keamanan siber KKP	2,5	indeks
		05-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,4	indeks
		06-Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim	76	persen
		07-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	76	nilai
		08-Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	89,39	nilai
		09-Survey kepuasan masyarakat KKP	88,30	nilai
		10-Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi (persen)	90	persen
		11-Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan	80	Persen
		12-Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP	3,05	Persen
		13-Indeks pelayanan publik KKP	4,59	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		14-Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP	4	indeks	
		15-Nilai mutu pelayanan unit kerja PTSA KKP	84	nilai	
	02-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data Statistik dan Informasi	01-Indeks profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	83	Indeks	
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin	100	persen	
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin	100	persen	
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Pusdatin	84	nilai	
		05-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP	100	Persen	
		06-Persentase realisasi penyerapan anggaran	95	Persen	
		07-Persentase unit kerja Pusdatin yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen	
		03-Tata kelola pemerintahan yang baik di pengelolaan informasi SDKP	01-Persentase jenis data geospasial SDKP yang terverifikasi dan tervalidasi	100	persen
			02-Persentase data citra satelit radar yang dikelola menjadi data geospasial kelautan dan perikanan	90	persen
		04-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BPISDKP	01-Nilai penilaian mandiri SAKIP BPISDKP	84	nilai
	02-Nilai kinerja anggaran BPISDKP		82	nilai	
	03-Persentase penyelesaian temuan BPK di		100	persen	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		lingkungan BPISDKP		
		04-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BLU BPISDKP	95	persen
		05-Persentase realisasi penyerapan anggaran	100	persen
		06-Persentase unit kerja BPISDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
		07-Indeks profesionalitas ASN BPISDKP	83	indeks
		08-Indeks kinerja pelaksanaan anggaran BPISDKP	93,76	nilai
		09-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju WBK	75	nilai
		10-Nilai kepuasan pelanggan pelayanan publik BPISDKP	85	nilai
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya modal usaha kelautan dan perikanan	01-Realisasi PNPB layanan BLU	30.000.000.000	rupiah
		02-Realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	1.358.780.000.000	rupiah
		03-Persentase realisasi pencairan terhadap akad pinjaman	85	persen
		04-Rasio dana bergulir diragukan tertagih	5	persen
		05-Modernisasi BLU	100	persen
		06-Indeks kepuasan pemanfaat atas layanan LPMUKP	85	indeks
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	80	persen
		02-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup LPMUKP	01-Nilai penilaian mandiri SAKIP LPMUKP	84
	02-Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP		86	nilai
	03-Persentase penyelesaian		100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		temuan BPK di lingkungan LPMUKP		
		04-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	80	persen
		05-Persentase realisasi penyerapan anggaran	90	persen
		06-Persentase unit kerja LPMUKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
2335- Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra ITJEN	≤ 0,5	persen
		02-Tingkat Maturitas SPIP Mitra ITJEN	3	level
		03-Unit kerja mitra inspektorat berpredikat menuju WBK	106	unit
		04-Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi mitra ITJEN	81	nilai
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP mitra ITJEN	84	nilai
		06-Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup mitra ITJEN	82	persen
		07-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra ITJEN	80	persen
		08-Nilai integritas KKP	80,5	nilai
		09-Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra ITJEN	18	rekomendasi
		10-Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup KKP	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		11-Persentase jumlah rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	70	persen
		12-Tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang dan jasa lingkup mitra ITJEN	82	persen
		13-Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra ITJEN	82	persen
	02-Tata Kelola Pengawasan Internal yang Akuntabel dan Efektif	01-Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup ITJEN	100	persen
		02-Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup ITJEN	100	persen
		03-Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup ITJEN	85	persen
		04-Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup ITJEN	89	persen
		05- Persentase kepatuhan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) lingkup ITJEN	80	persen
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal		01-Manajemen kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel	01-Level kapabilitas ITJEN	3
	02-Nilai penilaian mandiri SAKIP ITJEN		84	nilai
	03-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP		86	nilai
	02-Manajemen SDM Inspektorat Jenderal yang profesional	01-Indeks profesionalitas ASN	85	indeks
	03-Manajemen keuangan dan BMN yang akuntabel	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan keuangan ITJEN	≤ 0,5	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		02-Tingkat maturitas SPIP ITJEN	3,3	nilai
		03-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ITJEN	89	nilai
		04-Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai ITJEN secara tepat waktu	100	persen
		05-Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup ITJEN	100	persen
		06-Persentase pemenuhan fasilitas perkantoran sesuai kebutuhan tahunan ITJEN	100	persen
	04-Organisasi dan regulasi Inspektorat Jenderal yang efektif	01-Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan ITJEN	4,16	indeks
	05-Manajemen hasil pengawasan yang efektif	01-Unit kerja ITJEN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	89	persen
		02-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup ITJEN	80	persen
		03-Persentase pengelolaan data hasil pengawasan secara tertib dan handal	100	persen
		04-Persentase publikasi informasi dan kinerja pengawasan intern KKP secara aktual	100	persen
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01- Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	80	persen
		02-Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	100	persen
		03-Tingkat kepatuhan pengadaan	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		barang/jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap		
		04-Tingkat kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	80	persen
		05-Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	84	nilai
		06-Nilai Rekonsiliasi Kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	94	nilai
		07-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	93,76	nilai
		08-Nilai kinerja anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	86	nilai
		09-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	3,3	nilai
		10-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	84	indeks
		11-Persentase unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar	94	persen
		12-Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	inovasi
		13-Persentase data produksi KP yang tervalidasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	persen
		14-Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		15-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	persen
		16-Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	88,30	indeks
		17-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	persen
		18-Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra	81	persen
		19-Persentase penyelesaian masalah hukum	100	persen
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	01-Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	01-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	85	indeks
		03-Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	100	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya	82	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budidaya	3.3	nilai
		06-Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budidaya yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar	94	persen
		07-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya	75	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		09-Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	1	inovasi
		10-Indikator kinerja pelaksana anggaran Ditjen Perikanan Budidaya	93,76	nilai
		11-Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	86	nilai
		12-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		14-Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	90	persen
		15-Persentase pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	80	persen
		16-Persentase data produksi KP yang tervalidasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	100	persen
		17-Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	100	persen
		18-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Ditjen Perikanan Budidaya	100	persen
2355-Dukungan Manajemen	01-Tata kelola pemerintahan	01-Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi	80	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	yang baik lingkup Ditjen PSDKP	lingkup Ditjen PSDKP		
		02-Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	persen
		03-Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP	85	persen
		04-Persentase implementasi kerja sama luar negeri	80	persen
		05-Persentase dokumen kerja sama dalam negeri yang ditandatangani	80	Indeks
		06-Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	indeks
		07-Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP	70	nilai
		08-Indeks kepuasan masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	100	indeks
		09-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan standar Laik Operas (SLO) kapal perikanan	80	indeks
		10-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan lembar verifikasi hasil penangkapan ikan (LVHPI)	80	indeks
		11-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	nilai
		12-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP	100	persen
		13- Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP	80	persen
		14-Unit kerja Ditjen PSDKP berpredikat menuju WBK	15	unit
		15-Nilai minimal yang dipersyaratkan	75	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK (nama unit level II atau UPT)		
		16-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP	3,3	nilai
		17- Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		18- Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP	82	persen
		19-Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	82	indeks
		20-Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP bidang manajerial	77	nilai
		21-Tingkat kelulusan peserta diklat teknis bidang manajerial	82	persen
		22-Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	84	nilai
		23-Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		24-Nilai implementasi program budaya kerja	21	nilai
		25- Inovasi yang dihasilkan Sekretariat Ditjen PSDKP	1	inovasi
		26-Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PSDKP	≤ 0,5	persen
		27-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		28-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	80	persen
		29-Tingkat kepatuhan pengelolaan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP	80	persen
		30-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	80	persen
		31-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	94	persen
		32-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP	80	persen
		33-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	persen
		34- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PSDKP	93,76	nilai
		35-Persentase realisasi anggaran lingkup Ditjen PSDKP	99,4	persen
		36-Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	100	persen
		37-Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen PSDKP	86	nilai
		38-Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai kinerja anggaran	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		39-Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	100	persen
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP	01- Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	3,3	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen PDSPKP	80	indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP	84	unit kerja
		04-Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP	100	persen
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP	80	persen
		08-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	90	persen
		09-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP	86	nilai
		11-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP	80	persen
		12-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP	80	persen
		13-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP	80	persen
		14-Persentase lembar kerja data produksi Ditjen	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		PDSPKP yang tervalidasi		
		15-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Ditjen PDSPKP	100	persen
		16-Nilai pengawasan kearsipan di unit kearsipan Ditjen PDSPKP	75	nilai
		17-Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	80	persen
		18-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan	≤5	persen
		19-Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen
		20-Nilai penilaian mandiri pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP	4	nilai
		21- Persentase pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen
		22- Persentase data produksi KP yang tervalidasi lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen
		23- Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP	100	persen
	02-Terwujudnya layanan sarana dan prasarana internal lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi	01-Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	pada layanan prima			
	01-Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	01-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP	12	Bulan
2367-Dukungan Manajemen Internal Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	01-Layanan dukungan manajemen lingkup Ditjen PRL	01-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PRL	88	indeks
		02-Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PRL	8	unit kerja
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK Ditjen PRL	≤ 0,5	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen PRL	84	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PRL	3,3	level
		06-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PRL	92	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PKRL	80	persen
		08-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PRL	76	persen
		09-Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran	86	nilai
		11-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PRL	80	persen
		12-Tingkat kepatuhan pengadaan	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		barang/jasa Ditjen PRL		
		13-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PRL	80	persen
		14-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PRL	91	persen
		15-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL	12	bulan
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Terpenuhinya layanan dukungan manajemen di lingkungan BRSDM	01-Indeks profesionalitas ASN BRSDM	79	indeks
		02-Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkungan BRSDM	79	unit
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BRSDM realisasi anggaran	≤ 0,5	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP BRSDM	77	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BRSDM	3,3	nilai
		06-Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRSDM	80	persen
		08-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkup BRSDM	76	persen
		09- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BRSDM	93,76	nilai
		10-Nilai kinerja anggaran BRSDM	86	nilai
		11- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BRSDM	80	persen
		12-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BRSDM	80	persen
		13-Pendidikan dan pelatihan aparatur	5.423	orang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana internal	01-Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BRSDM tepat waktu	100	persen
	03-Terpenuhinya layanan perkantoran	01-Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BRSDM tepat waktu	100	persen
		02-Persentase pemenuhan layanan perkantoran BRSDM tepat waktu	100	persen
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM	01-Indeks profesionalitas ASN BKIPM	86	indeks
		02-Unit kerja berpredikat menuju WBK di Lingkungan BKIPM	29	unit kerja
		03-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BKIPM	0,5	persen
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP BKIPM	84	nilai
		05-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BKIPM	3,3	nilai
		06- Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar	94	persen
		07- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM	80	persen
		08-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BKIPM	76	persen
		09- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BKIPM	93,76	persen
		10-Nilai kinerja anggaran bKIPM	86	nilai
		11-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BKIPM	80	persen
		12-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		13-Tingkat kepatuhan BMN BKIPM	80	persen
		14-Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM	100	persen
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	01-Jumlah aparatur yang dididik dan dilatih	01-Aparatur KKP yang diberikan beasiswa	190	orang
		02-Aparatur KKP yang diberikan izin belajar	68	orang
		03-Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat)	5.165	orang

E. Dukungan terhadap Prioritas Nasional, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan Kegiatan Tematik

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka 6 (enam) PN dalam RKP tahun 2022 tetap dipertahankan hingga tahun 2024 dengan mengacu pada agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RPJMN tahun 2020-2024 memuat 41 (empat puluh satu) proyek prioritas strategis (*major project*) dengan daya ungkit tinggi. Dalam RKP tahun 2024, jumlah *major project* dilakukan penajaman dan penambahan menjadi 45 (empat puluh lima) *major project*. RPJMN tahun 2020-2024 juga telah menetapkan *major project* sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa *major project* direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP tahun 2024.

Kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN tahun 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital akan diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan tematik pada tahun 2024. Pengarusutamaan pada beberapa kegiatan tematik bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

PN yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	032.WA-Program Dukungan Manajemen
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	032.WA-Program Dukungan Manajemen

Major project yang terkait langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 3 (tiga) *major project* sebagai berikut:

1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana Pengolahan hasil KP (MP korporasi)
		032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)
		QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Usaha pembudidaya ikan yang dibina dan dikembangkan (MP Korporasi)
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)

2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PEH-Promosi	Promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional
			032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Program	Kegiatan	KRO	RO
			Benih udang yang disalurkan ke masyarakat
	2345-Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana kawasan dan kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat
		QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) yang diuji
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Klaster kawasan di lokasi major project revitalisasi tambak udang dan bandeng
			Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)
			Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan - IISAP

3. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan pendampingan major project pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional
			Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan-IFPIFM I
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
			Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan
	2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I
	2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II
			Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional

Major Project lainnya yang didukung oleh KKP pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	PDC-Sertifikasi Produk	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan

2. Destinasi Pariwisata Prioritas

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	2362-Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana prasarana Wisata Bahari

3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar

4. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PEH-Promosi	Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)

5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Program	Kegiatan	KRO	RO
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih

Kegiatan tematik yang akan dilaksanakan KKP pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Anggaran Infrastruktur

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.WA-Program Dukungan Manajemen	2329-Pengelolaan Data dan Informasi	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan
		RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	OM sarana data citra satelit radar

2. Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Iklim

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
		RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	Prasarana kawasan pesisir tangguh
		REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan mangrove yang direhabilitasi Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana

3. Anggaran Responsif Gender

Kegiatan	Klasifikasi RO	RO	Program
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan
			Masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapatkan percontohan penyuluhan
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	2362-Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	-Kelompok masyarakat penggerak konservasi
		REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan
		REB-Konservasi Jenis/Spesies	Keanekaragaman hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan
	4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana pengolahan produk turunan mangrove
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya
		2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan	Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat
		2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat

Kegiatan	Klasifikasi RO	RO	Program
	2350-Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP
	2352-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
	2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	AEE-Kemitraan	Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan
	2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina
	2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Sarana niaga garam Rakyat yang dibangun
		RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	Lahan garam yang difasilitasi
	2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya
		QEG-Bantuan Peralatan/ Sarana	Masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya
	3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar
	6706-Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
032.WA-Program Dukungan Manajemen	2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan
	2329-Pengelolaan Data dan Informasi	BMA-Data dan Informasi Publik	Layanan data statistik kelautan dan perikanan

Kegiatan	Klasifikasi RO	RO	Program
	2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan pendidikan dan pelatihan
	2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan pendidikan dan pelatihan Layanan perencanaan dan penganggaran
	6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang dilayani permodalan BLU

4. Anggaran Responsif Gender Bukan Tematik

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina
	5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	Orang yang menerima diseminasi diversifikasi produk KP
032.WA-Program Dukungan Manajemen	4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan pendidikan dan pelatihan

5. Anggaran Responsif Gender dan Anggaran Pendidikan

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten

6. Anggaran Responsif Gender dan Upaya Konvergensi Penanganan Stunting

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PEH-Promosi	Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

7. Mitigasi Perubahan Iklim

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.HB-Program Pengelolaan		BCE-Penanganan Perkara	Sengketa wilayah pesisir dan pulau-

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
Perikanan dan Kelautan	2352-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		pulau kecil yang ditangani
		BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
		QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
			Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

8. Anggaran Pendidikan

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, standar, prosedur dan kriteria pendidikan kelautan dan perikanan
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi pendidikan tinggi
		RAA-Sarana Bidang Pendidikan	Peralatan dan mesin pendidikan KP
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan kelautan dan perikanan
		RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Gedung, bangunan dan prasarana pendidikan menengah yang ditingkatkan kapasitasnya
		RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Gedung, Bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya
		SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten

9. Adaptasi Perubahan Iklim

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim
		RBH-Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	Prasarana kawasan pesisir tangguh

10. Upaya Konvergensi Penanganan Stunting

Program	Kegiatan	Klasifikasi RO	RO
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PEH-Promosi	Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri oleh daerah

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2024

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
01 - SEKRETARIAT JENDERAL				
WA - Program Dukungan Manajemen				
2322 - Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama				
AEC - Kerja sama	002 - Kesepakatan kerja sama antar lembaga	1	dokumen	4.003.481
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan hukum	5	layanan	8.335.000
	969 - Layanan bantuan hukum	1	layanan	2.165.000
PEC - Kerja sama	001 - Kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan	2	dokumen	7.500.000
2323 - Pengelolaan Organisasi dan SDM				
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	3	layanan	1.600.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	12	layanan	13.790.932
2325 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN				
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	1.860.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	37	dokumen	32.801.110
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	2	dokumen	8.245.967
	955 - Layanan manajemen keuangan	7	dokumen	7.979.930
2328 - Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum				

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Alat pengolah data dan komunikasi lingkup Sekretariat Jenderal	168	unit	6.159.084
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	3	layanan	18.305.000
	959 - Layanan protokoler	2	layanan	30.123.778
	962 - Layanan umum	16	layanan	56.550.650
	994 - Layanan perkantoran	2	layanan	306.989.433
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	15	unit	23.662.714
	971 - Layanan prasarana internal	2	unit	12.963.946
2329 - Pengelolaan Data dan Informasi				
BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Layanan data statistik kelautan dan perikanan	4	layanan	3.650.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	3.292.495
FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan	5	layanan	16.181.925
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sistem informasi sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi yang operasional	2	unit	39.900.000
	002 - Sarana data citra satelit radar	101	unit	11.546.300
	003 - <i>Satellite Constelalation Mission for Marine and Fisheries Resources</i>	5	unit	100.000
RCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - OM sarana data citra satelit radar	1	unit	216.160
6453 - Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				
BDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang dilayani permodalan BLU	4723	umkm	9.893.945
BIF - Pengawasan dan Pengendalian Layanan	001 - Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	layanan	1.383.120
BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Layanan teknologi informasi LPMUKP	1	layanan	764.000
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Layanan pengadaan perangkat TIK	5	unit	100.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan umum	1	layanan	3.162.305
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	24.779.369

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	5	unit	30.000
F AE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Laporan pengelolaan keuangan	2	laporan	883.680
	002 - Laporan pengawasan internal pengelolaan modal modal usaha	1	laporan	575.340
	003 - Laporan monitoring dan evaluasi program pengelolaan dana bergulir	1	laporan	167.335
02 - INSPEKTORAT JENDERAL				
WA - Program Dukungan Manajemen				
2335 - Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP				
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	4	dokumen	206.800
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	3	dokumen	720.000
	955 - Layanan manajemen keuangan	1	dokumen	526.667
	961 - Layanan reformasi kinerja	1	dokumen	120.960
	965 - Layanan audit internal	7	dokumen	36.728.278
	974 - Layanan penyelenggaraan kearsipan	1	dokumen	85.127
2336 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	25	unit	518.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	125.802
	957 - Layanan hukum	1	layanan	197.482
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	214.725
	962 - Layanan umum	1	layanan	336.881
	963 - Layanan data dan informasi	1	layanan	952.450
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	41.754.343
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	23	unit	2.189.710
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	214	orang	516.624
	996 - Layanan pendidikan dan pelatihan	214	orang	2.060.494
03 - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP				

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	002 - Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	6	rekomendasi kebijakan	1.000.000
	003 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	3	rekomendasi kebijakan	2.827.700
	004 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1	rekomendasi kebijakan	500.000
ACA - Perizinan Produk	001 - Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	4700	produk	6.000.000
ADC - Sertifikasi Produk	001 - Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	4	produk	1.000.000
BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	3200	orang	6.000.000
BKB - Pemantauan produk	001 - Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	49	laporan	500.000
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	34	lembaga	1.500.000
PCA - Perizinan Produk	001 - Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1200	produk	800.000
	002 - Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	20	produk	200.000
PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Awak kapal perikanan yang disertifikasi	24000	orang	3.000.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	002 - Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	120	orang	4.900.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	14000	orang	1.000.000
QDH - Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001 - Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pada usaha perikanan	60	badan hukum	150.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	002 - Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	17000	unit	21.250.000
	003 - Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	1300	unit	31.872.300
2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	7	rekomendasi kebijakan	5.300.000
BGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001 - Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	74	lembaga	4.000.000
	002 - Pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	31	lembaga	38.604.744
	004 - Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	74	lembaga	2.000.000
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikananannya	37	lembaga	4.650.000
PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Syahbandar dan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	orang	1.000.000
	002 - Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	100	orang	500.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001 - Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	12	lembaga	5.000.000
	002 - Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung penangkapan ikan terukur	171	lembaga	32.000.000
RAL - Sarana Bidang Kematriman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana penunjang pemungutan PNBP perikanan tangkap yang disediakan	23	unit	5.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kematriman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur	31	unit	20.000.000
	003 - Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	unit	20.100.000
	004 - Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	4	unit	30.100.000
	005 - Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung penangkapan ikan terukur	25	unit	10.000.000
	006 - Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	7	unit	100.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Petugas pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung penangkapan ikan terukur	1650	orang	6.000.000
2339 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan				
ACA - Perizinan Produk	001 - Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	6700	produk	1.750.000
BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	30000	orang	27.500.000
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	37	provinsi	1.600.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	6	rekomendasi kebijakan	8.500.000
PCA - Perizinan Produk	001 - Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	11000	produk	1.500.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	10000	orang	2.000.000
	002 - Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	3500	orang	5.000.000
	003 - Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1500	orang	2.200.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Kelompok Usaha Bersama yang meningkatkan kapasitas kelembagaannya	3250	kelompok nelayan	1.600.000
	004 - Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkatkan kapasitas kelembagaannya (MP Korporasi)	15	kelompok nelayan	2.000.000
QEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	001 - Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	65	kelompok nelayan	104.900.000
	002 - Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	10	kelompok nelayan	10.000.000
	005 - Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project (Lautra)</i>	3	kelompok nelayan	50.000
QKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	001 - Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	10.000	laporan	2.000.000
	002 - Kelompok usaha bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	300	laporan	1.000.000
	003 - Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	160.000	laporan	2.500.000
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	37	provinsi	8.250.000
2341 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI perairan darat	3	rekomendasi kebijakan	2.000.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	002 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	3	rekomendasi kebijakan	3.000.000
	003 - Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	11	rekomendasi kebijakan	1.500.000
BGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001 - Lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia di perairan darat yang terbentuk	14	lembaga	550.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data <i>log book</i> penangkapan ikan	11	rekomendasi kebijakan	1.500.000
	002 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan	3	rekomendasi kebijakan	1.000.000
	003 - Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan observer diatas kapal perikanan	11	rekomendasi kebijakan	8.500.000
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001 - Lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	lembaga	2.000.000
	004 - Lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dikelola kelebagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	lembaga	50.000
QKB - Pemantauan produk	001 - Laporan data <i>log book</i> penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	15.000	laporan	2.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	002 - Prasarana pemulihan sumber daya ikan berkelanjutan yang dibangun	6	unit	3.000.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap				

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	955 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	unit	6.750.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	3.000.000
	957 - Layanan hukum	1	layanan	3.000.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	layanan	4.814.053
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	2.070.000
	962 - Layanan umum	1	layanan	1.000.000
	963 - Layanan data dan informasi	1	layanan	12.288.000
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	374.411.294
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	1	unit	13.360.232
	971 - Layanan prasarana internal	1	unit	10.139.768
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	1	layanan	5.500.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	7	layanan	13.464.000
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	30	layanan	9.378.890
	955 - Layanan manajemen keuangan	1	layanan	12.259.110
	974 - Layanan penyelenggaraan kearsipan	1	layanan	800.000
04 - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA				
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2344 - Pengelolaan Perbenihan Ikan				
BAB - Pelayanan Publik kepada Lembaga	001 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	150	lembaga	800.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang perbenihan	8	rekomendasi kebijakan	1.200.000
QED - Bantuan Tanaman	001 - Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	26.300	unit	1.000.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	120	unit	6.450.000
	002 - Infrastruktur kawasan budidaya rumput laut - <i>Oceans for Prosperity Project (Lautra)</i>	1	unit	100.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	003 - Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat	2	unit	33.100.000
QEL - Bantuan Hewan	u01 - calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	45.868		1.628.642
	u02 - calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat	14.908	ekor	796.323
	U03 - Calon induk unggul ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	152	ekor	15.200
	U04 - Calon induk unggul kepiting yang disalurkan ke masyarakat	85	ekor	13.022
	U05 - Calon induk unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	144	ekor	46.858
	U06 - Benih ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat	32.604.747	ekor	10.824.777
	U07 - Benih ikan air payau yang disalurkan ke Masyarakat	3.626.459	ekor	862.401
	U08 - Benih udang yang disalurkan ke masyarakat	48.005.580	ekor	2.400.279
	U09 - Benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat	335.021	ekor	231.499
	U10 - Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat	2.318.258	ekor	13.163.889
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Calon induk unggul yang diproduksi	1.000.000	ekor	40.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	002 - Prasarana produksi perikanan budidaya	3	unit	29.000.000
2345 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan				
BJC - Penyidikan dan Pengujian Penyakit	U01 - Sampel residu layanan UPT	1.133	sampel	1.085.549
	U02 - Sampel kualitas air layanan UPT	14.825	sampel	3.010.317
	U03 - Sampel patologi layanan UPT	767	sampel	442.249
	U04 - Sampel mikrobiologi layanan UPT	3.342	sampel	1.784.715

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)	
	U05 - Sampel biologi molekuler layanan UPT	2.273	sampel	2.151.814
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang kawasan dan kesehatan ikan	9	rekomendasi kebijakan	1.350.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana kawasan dan kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat	96	unit	139.200.000
QJC - Penyidikan dan Pengujian Penyakit	001 - Sampel monitoring residu yang diuji	4.000	sampel	10.400.000
	002 - Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji	755	sampel	1.500.000
	U03 - Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	735	sampel	651.862
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	unit	1.500.000
	002 - Sarana perikanan budidaya di UPT	4	unit	5.800.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Klaster kawasan di lokasi major project revitalisasi tambak udang dan bandeng	9	unit	12.000.000
	002 - Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	10	unit	2.500.000
	003 - Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan - IISAP	8	unit	70.100.000
	004 - Prasarana produksi perikanan budidaya	5	unit	7.500.000
	006 - Budidaya udang terintegrasi - ISF	2	unit	212.100.000
	007 - Klaster kawasan tambak udang dan bandeng di lokasi prioritas lainnya	1	unit	5.500.000
2346 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan				
ACD - Perizinan Lembaga	001 - Perizinan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan	50	lembaga	250.000
AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budidaya	11.000	orang	11.000.000
AEG - Konferensi dan Event	001 - Konferensi dan <i>event</i> perikanan budidaya	16	kegiatan	2.600.000
BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Unit budi daya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	1	lembaga	1.000.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha	7	rekomendasi kebijakan	1.700.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	3.000	orang	600.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Usaha pembudidaya ikan yang dibina dan dikembangkan (MP Korporasi)	15	unit	2.250.000
QEA - Bantuan Masyarakat	001 - Bantuan premi asuransi usaha perikanan budidaya yang disalurkan	500	orang	1.200.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	1.070	unit	125.900.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan	2	unit	26.750.000
5747 - Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan				
ACA - Perizinan Produk	001 - Pakan dan obat ikan diregistrasi	150	produk	1.200.000
BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Sertifikasi pakan dan obat ikan yang diterbitkan	52	lembaga	750.000
BJC - Penyidikan dan Pengujian Penyakit	U01 - Sampel nutrisi pakan	236	sampel	118.752
	U02 - Sampel obat ikan	116	sampel	71.490
	U03 - Sampel mutu pakan	118	sampel	109.758
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi dan sosialisasi kebijakan tata kelola bidang pakan dan obat ikan	8	rekomendasi kebijakan	1.750.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	40	unit	6.800.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional UPT	950.000	unit	12.160.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Kluster komoditas unggulan berbasis kawasan	1	unit	10.250.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
2348 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	81	unit	2.800.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	650.000
	957 - Layanan hukum	1	layanan	1.250.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	35	layanan	11.840.000
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	950.000
	962 - Layanan umum	16	layanan	10.295.000
	963 - Layanan data dan informasi	35	layanan	8.425.000
	994 - Layanan perkantoran	20	layanan	319.801.011
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	4	unit	1.850.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	001 - Layanan manajemen SDM	1.241	orang	6.007.605
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	53	dokumen	11.454.044
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	71	dokumen	11.393.351
	955 - Layanan manajemen keuangan	50	dokumen	9.785.000
05 - DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2350 - Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan				
ACA - Perizinan Produk	001 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5150	produk	2.587.650
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK pemantauan dan operasi armada	4	NSPK	500.000
BKB - Pemantauan produk	001 - Operasi armada dan infrastruktur pengawasan SDKP yang Dipantau	3	laporan	1.000.000
	002 - Operasional pembinaan POKMASWAS yang dipantau	34	laporan	1.000.000
CBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun	8	unit	4.206.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1110	kelompok masyarakat	8.500.000
QHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001 - Operasi kapal pengawas	75	hari operasi	477.737.941

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)	
	002 - Operasi pesawat patroli	170	hari operasi	50.000.000
	003 - Operasi <i>speedboat</i> pengawas	30	hari operasi	15.700.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Kapal pengawas	10	unit	30.000.000
	002 - <i>Speedboat</i> pengawas	2	unit	10.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana pengawasan SDKP yang dibangun	24	unit	20.870.000
RCG - OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 - Armada pengawasan SDKP yang dirawat	125	unit	80.650.000
RDS - OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional	1	unit	6.162.350
2351 - Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan				
AEA - Koordinasi	002 - Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	19	kegiatan	4.570.800
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK bidang penanganan pelanggaran	1	NSPK	205.000
BCE - Penanganan Perkara	002 - Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	182	perkara	5.667.625
	001 - Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi pidana	52	perkara	3.574.000
BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	200	orang	600.000
	002 - Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	150	orang	500.000
BKB - Pemantauan produk	001 - Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	36	laporan	4.467.075
2352 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan				
AEA - Koordinasi	001 - Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	4	kegiatan	4.542.925
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	4	NSPK	800.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
BCE - Penanganan Perkara	001 - Sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	3	perkara	1.830.000
BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	500	orang	750.000
BHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001 - Operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan	5	operasi	657.075
BIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	450	lembaga	886.000
BII - Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	001 - Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	1	laporan	200.000
BKB - Pemantauan produk	001 - Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	12	laporan	5.600.000
CAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana pengawasan sumber daya kelautan	39	unit	1.000.000
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan	10	pemerintah daerah	1.500.000
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	267	lembaga	14.758.500
	002 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	500	lembaga	1.678.000
2353 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan				
AEA - Koordinasi	001 - Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	2	kegiatan	2.885.670
AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosialisasi dan diseminasi kebijakan pengawasan perikanan	300	orang	500.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3	NSPK	788.000
BHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001 - Operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan	4	operasi	247.160

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
BKB - Pemantauan produk	005 - Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang dipantau	12	laporan	6.794.170
FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan pengawasan perikanan	15	pemerintah daerah	1.600.000
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	2450	lembaga	17.021.820
WA - Program Dukungan Manajemen				
2355 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	167	unit	2.077.495
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	1.766.550
	957 - Layanan hukum	1	layanan	995.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	layanan	6.201.824
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	1.006.606
	962 - Layanan umum	1	layanan	14.112.992
	963 - Layanan data dan informasi	1	layanan	1.367.000
	969 - Layanan bantuan hukum	1	layanan	300.000
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	282.859.307
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	492	unit	2.684.725
	971 - Layanan prasarana internal	12	unit	3.884.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	1514	orang	4.155.930
	996 - Layanan pendidikan dan pelatihan	272	orang	8.509.746
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	1	layanan	6.417.050
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	1	layanan	2.281.494
	955 - Layanan manajemen keuangan	1	layanan	4.831.288
	961 - Layanan reformasi kinerja	1	layanan	4.908.300
	974 - Layanan penyelenggaraan kearsipan			

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
06 - DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN				
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan				
BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Lembaga pengelola pasar ikan yang dibina	100	lembaga	1.500.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan pendampingan major project pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	1	dokumen	500.000
	002 - Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan-IFPIFM I	1	dokumen	100.000
PEB - Forum	001 - Forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor	3	forum	1.500.000
PEH - Promosi	001 - Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	185	promosi	35.180.900
	004 - Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri oleh daerah	38	promosi	2.660.000
	002 - Promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional	6	promosi	9.000.000
	003 - Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri	4	promosi	2.000.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Peralatan pemasaran	6000	unit	8.100.000
	002 - Kendaraan pemasaran alih teknologi informasi	2	unit	1.200.000
QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Profil pasar ekspor hasil kelautan perikanan	4	data	1.000.000
	002 - Profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan	4	data	1.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana pemasaran kelautan dan perikanan	13	unit	14.500.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
UAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Bursa pasar ikan	1	sistem informasi	500.000
2358 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan				
ADA - Standarisasi Produk	001 - Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	15	produk	1.800.000
BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Profilling industri pengolahan hasil perikanan	3	data	750.000
PDC - Sertifikasi Produk	001 - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan	10000	produk	2.550.000
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina	2675	umkm	9.379.000
QDI - Fasilitasi dan Pembinaan Industri	051 - UPI skala menengah besar yang dibina	500	industri	1.100.000
	052 - Industri pengolahan yang dibina oleh daerah	2340	industri	2.660.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana sistem rantai dingin hasil KP	448	unit	26.064.100
	002 - Sarana pengolahan hasil KP	279	unit	15.355.000
	004 - Sarana Pengolahan hasil KP (MP korporasi)	8	unit	1.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun	1	unit	10.700.000
5279 - Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan				
ADA - Standarisasi Produk	001 - Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	5	RSNI	500.000
	002 - Produk yang diuji dan dinilai kesesuaiannya	500	produk	2.600.000
AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Orang yang menerima diseminasi dan diversifikasi produk KP	1000	orang	1.000.000
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang difasilitasi dalam inkubator bisnis	55	UMKM	2.750.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	002 - UMKM yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP	45	UMKM	1.750.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2356 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	004 - Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	5	rekomendasi	1.250.000
AEE - Kemitraan	001 - Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	29	kesepakatan	1.160.000
BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Pengelola kapal pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	8	lembaga	800.000
BMA - Data dan Informasi Publik	051 - Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	4	data	1.000.000
QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	002 - Pengelola gudang yang difasilitasi penerapan sistem resi gudang	10	lembaga	850.000
	003 - Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	8	lembaga	1.000.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana penyimpanan produk KP	15	unit	37.152.000
	002 - Sarana distribusi logistik produk KP	5	unit	4.320.000
	003 - Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5	unit	4.320.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	051 - Sarana pendukung operasional gudang beku	287	unit	1.434.500
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	1	unit	2.237.500
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	003 - Prasarana Pendukung operasional gudang beku 1000 (seribu) ton	4	unit	2.050.000
2360 - Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan				
BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	4	dokumen	1.400.000
PEH - Promosi	001 - Promosi usaha dan investasi KP	4	promosi	3.000.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	45	lembaga	2.450.000
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	875	UMKM	8.072.500
	002 - UMKM KP yang difasilitasi pembiayaan usaha	2565	UMKM	5.100.000
	005 - UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha	126	UMKM	2.701.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
2361 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	051 - Perangkat pengolah data dan komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	80	unit	1.000.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan hukum	1	layanan	1.700.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	layanan	3.813.793
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	1.400.000
	962 - Layanan umum	2	layanan	9.390.809
	963 - Layanan data dan informasi	39	layanan	12.500.000
	994 - Layanan perkantoran	2	layanan	93.225.781
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	385	unit	2.400.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	1	layanan	2.200.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	40	layanan	12.472.268
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	2	layanan	2.600.000
	955 - Layanan manajemen keuangan	4	layanan	3.600.000
	961 - Layanan reformasi kinerja	1	layanan	1.100.000
07 - DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT				
FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup				

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
2362 - Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Rekomendasi pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut	28	rekomendasi kebijakan	17.998.297
	002 - Rekomendasi penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	10	rekomendasi kebijakan	300.000
	003 - Rekomendasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	10	rekomendasi kebijakan	3.698.743
PEC - Kerja sama	001 - Kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut	8	kesepakatan	800.000
PEE - Kemitraan	001 - Jejaring dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati laut	5	kesepakatan	1.000.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen NSPK konservasi dan keanekaragaman hayati laut	12	NSPK	3.150.000
QEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	001 - Kelompok masyarakat penggerak konservasi	20	kelompok masyarakat	3.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana pendukung penyelenggaraan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut	9	unit	4.487.338
REA - Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002 - Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau - pulau kecil yang operasional	17.800.000	hektar	6.574.728
	003 - Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	17.800.000	hektar	1.950.000
	004 - <i>Oceans for Prosperity Project</i> (Lautra)	1.600.000	hektar	5.100.000
REB - Konservasi Jenis/Spesies	001 - Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	20	jenis/spesies	5.160.000
	002 - Keanekaragaman hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan	9	jenis/spesies	11.732.200

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	100	daerah	1.250.000
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	10	daerah	630.000
4346 - Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen NSPK pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil	4	NSPK	1.000.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan penyadaran terhadap penanggulangan dampak pencemaran	34	kelompok masyarakat	12.997.000
	002 - Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim	3	kelompok masyarakat	1.500.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	002 - Sarana pengolahan produk turunan mangrove	10	unit	2.000.000
RBH - Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001 - Prasarana kawasan pesisir tangguh	2	unit	2.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	4	unit	1.800.000
	002 - Prasarana penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil	15	unit	9.475.000
REA - Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001 - Kawasan mangrove yang direhabilitasi	100	hektar	5.700.000
	002 - Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	10	hektar	1.800.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2363 - Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
ABW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Rekomendasi kebijakan/perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	3	rekomendasi kebijakan	730.000
	002 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan perairan	5	rekomendasi kebijakan	900.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051 - Dokumen NSPK jasa kelautan	2	NSPK	200.000
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	5	rekomendasi kebijakan	2.500.000
	002 - Rekomendasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut	2	rekomendasi kebijakan	800.000
	003 - Rekomendasi pengelolaan sentra ekonomi garam	10	rekomendasi kebijakan	3.500.000
	004 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	1	rekomendasi kebijakan	750.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen NSPK jasa kelautan	6	NSPK	6.780.000
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	001 - Sarana prasarana wisata bahari	8	unit	6.700.000
	002 - Sarana prasarana BMKT	2	unit	1.700.000
	003 - Sarana niaga garam rakyat yang dibangun	31	unit	38.011.000
	004 - Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	2	unit	2.315.000
RAI - Sarana Pengembangan Kawasan	001 - Lahan garam yang difasilitasi	75	hektar	6.209.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Pengelola wisata bahari yang ditingkatkan kompetensinya	55	orang	600.000
2365 - Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar	5	rekomendasi kebijakan	2.125.000
	002 - Rekomendasi pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	3	rekomendasi kebijakan	660.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil	1	NSPK	200.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	1	NSPK	225.000
002 - NSPK pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil			
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3	kelompok masyarakat	1.200.000
001 - Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya			
	4	kelompok masyarakat	1.600.000
003 - Masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya			
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	55	paket	7.975.000
001 - Bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar			
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	3	unit	10.525.000
001 - Prasarana/Infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar			
2366 - Perencanaan Ruang Laut			
PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	550	rekomendasi kebijakan	12.750.000
007 - Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)			
	34	rekomendasi kebijakan	4.800.000
008 - Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi KKPRL			
	8	rekomendasi kebijakan	7.270.000
009 - Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut			
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	3	rekomendasi kebijakan	4.000.000
001 - Rekomendasi kebijakan rencana zonasi kawasan antar wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan-undangan			
	3	rekomendasi kebijakan	3.000.000
002 - Rekomendasi kebijakan materi teknis perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam rencana tata ruang KSN			
	3	rekomendasi kebijakan	3.500.000
003 - Rekomendasi kebijakan materi teknis perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang KSN			
	1	rekomendasi kebijakan	1.350.000
007 - Rekomendasi integrasi RTRL dengan RTRWN			

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	008 - Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang memiliki rencana zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan- undangan	1	rekomendasi kebijakan	2.100.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen NSPK perencanaan ruang laut	4	NSPK	2.100.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut	4	unit	1.263.000
	002 - Pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut (MSU)	4	unit	187.100.000
UBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003 - Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW provinsi	10	daerah	3.400.000
	004 - Pemerintah daerah yang dibina untuk pengelolaan KKPR	4	daerah	2.250.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
2367 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan informasi	35	unit	2.684.170
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	8	layanan	2.684.039
	957 - Layanan hukum	1	layanan	8.485.800
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	6	layanan	8.675.535
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	9	layanan	3.328.229
	962 - Layanan umum	5	layanan	10.900.235
	963 - Layanan data dan informasi	14	layanan	2.745.484
	994 - Layanan perkantoran	2	layanan	149.994.337
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	53	unit	3.538.890
	971 - Layanan prasarana internal	3	unit	2.355.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	1.090	orang	5.221.589
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	43	dokumen	7.317.900
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	43	dokumen	8.522.633

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	955 - Layanan manajemen keuangan	43	dokumen	4.492.886
08- BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
2375 - Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
ABW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Inovasi yang diterapkan untuk pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan	8	kajian	717.156
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	8	NSPK	4.000.000
DCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi	1450	orang	699.780
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan	47000	kelompok masyarakat	75.700.000
	002 -Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan	49	kelompok masyarakat	27.265.225
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Peralatan dan mesin pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	6	unit	4.528.118
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Gedung, bangunan dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	unit	1.000.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bidang usaha kelautan dan perikanan	35173	orang	59.384.560
2376 - Pendidikan Kelautan dan Perikanan				
ABW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	23	kajian	2.560.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pendidikan kelautan dan perikanan	5	NSPK	1.452.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Kelompok masyarakat yang mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi pendidikan tinggi	14	kelompok masyarakat	1.661.000
RAA - Sarana Bidang Pendidikan	001 - Peralatan dan mesin pendidikan kelautan dan perikanan	21	unit	8.768.155
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan kelautan dan perikanan	9	unit	1.227.350
RBI - Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001 - Gedung, bangunan dan prasarana pendidikan menengah yang ditingkatkan kapasitasnya	3	unit	9.328.500
RBJ - Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	001 - Gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	9	unit	19.837.165
SAC - Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	8020	orang	154.165.830
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
6706 - Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan				
ABW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001 - Rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan	8	rekomendasi kebijakan	1.000.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
2378 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang riset dan SDM KP	3	unit	550.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	14	layanan	2.632.522
	957 - Layanan hukum	1	layanan	1.000.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	21	layanan	7.152.429

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	2	layanan	1.027.010
	962 - Layanan umum	46	layanan	9.736.727
	963 - Layanan data dan informasi	8	layanan	1.491.553
	994 - Layanan perkantoran	43	layanan	1.030.418.329
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	6	unit	1.870.493
	971 - Layanan prasarana internal	2	unit	2.800.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	19	layanan	3.019.665
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	46	layanan	8.729.184
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	58	layanan	6.614.961
	955 - Layanan manajemen keuangan	47	layanan	5.649.873
	974 - Layanan penyelenggaraan kearsipan	5	layanan	1.096.076
FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Sistem informasi pemerintahan bidang riset dan SDM KP	1	sistem informasi	500.000
4345 - Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP				
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan pendidikan dan pelatihan	5.423	orang	14.000.000
09 - BADAN KARANTIKAN IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN				
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
3989 - Pengendalian Mutu				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	009 - Rekomendasi kebijakan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	28	rekomendasi kebijakan	1.000.000
ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	300	lembaga	2.000.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	1	NSPK	100.000
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	46	produk	1.500.000
PDC - Sertifikasi Produk	001 - Sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	3000	produk	3.955.910

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	80	produk	8.000.000
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Unit penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	500	lembaga	3.000.000
	002 - UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.080	lembaga	4.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana pengujian mutu	20	unit	3.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana pengujian mutu	5	unit	1.500.000
3990 - Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
ADD - Standarisasi Lembaga	001 - Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	47	lembaga	1.000.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria	001 - NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan	1	NSPK	200.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	50	rekomendasi kebijakan	5.000.000
	002 - Rekomendasi kebijakan metode/parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	25	rekomendasi kebijakan	2.500.000
PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian kesehatan ikan dan mutu	28	lembaga	1.500.000
	002 - Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	47	lembaga	1.500.000
	003 - Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	25	lembaga	700.000
	004 - Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	41	lembaga	500.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan	6050	orang	13.500.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan			
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	400	produk	7.800.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
3988 - Karantina Ikan				
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi kebijakan peta lokasi sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	250	rekomendasi kebijakan	3.000.000
	002 - Rekomendasi kebijakan peta lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, bersifat invasif	86	rekomendasi kebijakan	1.000.000
	003 - rekomendasi kebijakan harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri	8	rekomendasi kebijakan	400.000
	004 - Rekomendasi kebijakan mitigasi resiko media pembawa HPIK	6	rekomendasi kebijakan	1.800.000
PDC - Sertifikasi Produk	001 - Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	250000	produk	12.500.000
PDF - Sertifikasi Lembaga	001 - Unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i>	800	lembaga	5.000.000
QCE - Penanganan Perkara	001 - Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan	80	perkara	1.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana pengawasan karantina	3	unit	1.200.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Prasarana pengawasan karantina	3	unit	1.000.000
WA - Program Dukungan Manajemen				
3987 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Alat pengolah data dan komunikasi lingkup BKIPM	15	unit	550.000

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	800.000
	957 - Layanan hukum	1	layanan	700.000
	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	layanan	1.500.000
	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	1.500.000
	962 - Layanan umum	1	layanan	10.000.000
	963 - Layanan data dan informasi	1	layanan	1.500.000
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	406.284.385
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	1	unit	300.000
	971 - Layanan prasarana internal	1	unit	200.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	1889	orang	3.500.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	1	dokumen	8.428.939
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	1	dokumen	1.500.000
	955 - Layanan manajemen keuangan	1	dokumen	1.500.000
	974 - Layanan penyelenggaraan kearsipan	1	dokumen	700.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2024

RINCIAN MAJOR PROJECT DAN PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

A. MAJOR PROJECT

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
01 - Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	
01 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2358 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
PDC - Sertifikasi Produk	
001 - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan	2.550.000
02 - Destinasi Pariwisata Prioritas	
01 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362 - Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	
REA - Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
003 - Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	1.950.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363 - Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	
001 - Sarana prasarana Wisata Bahari	6.700.000
04-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
02 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2339 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
004 - Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	2.000.000
QEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	
002 - Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (MP Korporasi)	10.000.000
03 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2346 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001 - Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidayaan Ikan Yang Akan Disertipikasi	600.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Usaha Pembudidayaan Ikan yang Dibina dan Dikembangkan (MP Korporasi)	2.250.000
04 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2358 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	
004 - Sarana Pengolahan Hasil KP (MP korporasi)	1.500.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	
003 - Sarana Distribusi Logistik Produk KP (MP Korporasi)	4.320.000
03 - Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	
01 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2344 - Pengelolaan Perbenihan Ikan	
QEL - Bantuan Hewan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
U02 - Calon Induk Unggul Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	796.323
U03 - Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	15.200
U07 - Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	862.401
U08 - Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	2.400.279
2345 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	
QEG - Bantuan Peralatan /Sarana	
001 - Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	139.200.000
QJC - Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U03 - Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang Diuji	651.862
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	12.000.000
002 - Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif (PITAP)	2.500.000
003 - Infrastruktur Budidaya Udang yang di Tingkatkan - IISAP	70.100.000
02 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH – Promosi	
002 - Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	9.000.000
04 - Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	
01 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
QEG - Bantuan Peralatan /Sarana	
002 - Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan	21.250.000
003 - Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan	31.872.300
2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
003 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan - IFP IFM I	20.100.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
006 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan - IFP IFM II	100.000
2341 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001 - Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional	2.000.000
02 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Pendampingan MP Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi Pasar Ikan Bertaraf Internasional	500.000
002 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan-IFPIFM I	100.000
05 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara	
01 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001 - Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional Sesuai Standar	5.000.000
06 - Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	
01 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH - Promosi	
001 - Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	35.180.900
07 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	
01 - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375 - Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	59.384.560

B. PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
01 - Sekretariat Jenderal	
WA - Program Dukungan Manajemen	
2329 - Pengelolaan Data dan Informasi	
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional	39.900.000
002 - Sarana Data Citra Satelit Radar	11.546.300
003 - <i>Satellite Constelation Mission for Marine and Fisheries Resources</i>	100.000
RCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - OM Sarana Data Citra Satelit Radar	216.160
02 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
PCA - Perizinan Produk	
001 - Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan	800.000
002 - Dokumen Bukti Lulus Seleksi Calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Awak Kapal Perikanan Migran yang Diterbitkan	200.000
PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	
001 - Awak Kapal Perikanan yang Disertifikasi	3.000.000
002 - Petugas yang Tersertifikasi Di Bidang Kapal Perikanan	4.900.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001 - Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Dengan Pelaku Usaha	1.000.000
QDH - Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001 - Pelaku Usaha yang Difasilitasi Penerapan Prinsip HAM Pada Usaha Perikanan	150.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QEG - Bantuan Peralatan /Sarana	
002 - Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan	21.250.000
003 - Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan	31.872.300
2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	
001 - Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang Difasilitasi Pelatihannya	1.000.000
002 - Petugas Mutu Dan Sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang Difasilitasi Pelatihannya	500.000
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
002 - Pelabuhan Perikanan yang Dikelola Pendataannya Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	32.000.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Sarana Penunjang Pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang Disediakan	5.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang Ditingkatkan Fasillitasnya Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	20.000.000
003 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan - IFP IFM I	20.100.000
004 - Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau Berwawasan Lingkungan yang Dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	30.100.000
005 - Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Prasarananya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	10.000.000
006 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan - IFP IFM II	100.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Petugas Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Rangka Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	6.000.000
2339 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	8.500.000
PCA - Perizinan Produk	
001 - Izin Alokasi Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) yang Diterbitkan	1.500.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001 - Bidang Tanah Nelayan yang Difasilitasi Sertifikatnya	2.000.000
002 - Nelayan yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya	5.000.000
003 - Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya	2.200.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya	1.600.000
004 - Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	2.000.000
QEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	
001 - Kampung Nelayan yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Kampung Nelayan Maju/Kalaju)	104.900.000
002 - Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (MP Korporasi)	10.000.000
005 - Kampung Nelayan Yang Ditingkatkan Fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	50.000
QKA - Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
001 - Bidang Tanah Nelayan yang Diidentifikasi Untuk Difasilitasi Sertifikatnya	2.000.000
002 - Kelompok Usaha Bersama yng Diidentifikasi Untuk Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	1.000.000
003 - Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya Dalam Rangka Perlindungan Nelayan	2.500.000
UBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001 - Sistem Perizinan Pusat-Daerah yang Terintegrasi	8.250.000
2341 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Pengolahan dan Analisis Data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	1.500.000
002 - Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	1.000.000
003 - Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Pengolahan dan Analisis Data Pemantauan Observer Diatas Kapal Perikanan	8.500.000
Qga - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001 - Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional	2.000.000
004 - Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Terkelola Kelembagaannya - <i>Ocean For Prosperity Project</i> (Lautra)	50.000
QKB - Pemantauan Produk	
001 - Laporan Data <i>Log book</i> Penangkapan Ikan yang Dikumpulkan dan Diverifikasi	2.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002 - Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang Dibangun	3.000.000
03 - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2344 - Pengelolaan Perbenihan Ikan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	1.200.000
QED - Bantuan Tanaman	
001 - Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan Ke Masyarakat	1.000.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Perbenihan Ikan yang Disalurkan Ke Masyarakat	6.450.000
002 - Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - <i>Oceans For Prosperity Project</i> - Lautra	100.000
003 - Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan yang Dibangun Bagi Masyarakat	33.100.000
Qel - Bantuan Hewan	
U01 - Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Disalurkan Ke Masyarakat	1.628.642
U02 - Calon Induk Unggul Udang yang Disalurkan Ke Masyarakat	796.323
U03 - Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan Ke Masyarakat	15.200
U04 - Calon Induk Unggul Kepiting yang Disalurkan Ke Masyarakat	13.022
U05 - Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat	46.858
U06 - Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan Ke Masyarakat	10.824.777
U07 - Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan Ke Masyarakat	862.401
U08 - Benih Udang yang Disalurkan Ke Masyarakat	2.400.279
U09 - Benih Kepiting yang Disalurkan Ke Masyarakat	231.499
U10 - Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat	13.163.889
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Calon Induk Unggul yang Diproduksi	40.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002 - Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	29.000.000
2345 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.350.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan Ke Masyarakat	139.200.000
QJC - Penyidikan dan Pengujian Penyakit	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001 - Sampel Monitoring Residu yang Diuji	10.400.000
002 - Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang Diuji	1.500.000
U03 - Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang Diuji	651.862
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Peralatan Laboratorium Pengujian Penyakit dan Lingkungan yang Disediakan	1.500.000
002 - Sarana Perikanan Budidaya di UPT	5.800.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	12.000.000
002 - Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif (PITAP)	2.500.000
003 - Infrastruktur Budidaya Udang yang Di Tingkatkan - IISAP	70.100.000
004 - Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	7.500.000
006 - Budidaya Udang Terintegrasi - ISF	212.100.000
007 - Klaster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng di Lokasi Prioritas Lainnya	5.500.000
2346 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	1.700.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001 - Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidayaan Ikan yang Akan Disertifikasi	600.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Usaha Pembudidayaan Ikan yang Dibina dan Dikembangkan (MP Korporasi)	2.250.000
QEA - Bantuan Masyarakat	
001 - Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang Disalurkan	1.200.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Produksi Usaha yang Disalurkan Ke Masyarakat	125.900.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan	26.750.000
5747 - Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan	1.750.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Peralatan/Sarana Pakan dan Obat Ikan yang Disalurkan Ke Masyarakat	6.800.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Pakan Ikan yang Diproduksi Untuk Operasional UPT	12.160.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan	10.250.000
04 - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2353 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
004 - Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan	17.021.820
05 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Pendampingan MP Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi Pasar Ikan Bertaraf Internasional	500.000
002 - Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang Dikembangkan-IFPIFM I	100.000
PEB - Forum	
001 - Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor	1.500.000
PEH - Promosi	
004 - Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri Oleh Daerah	2.660.000
002 - Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	9.000.000
003 - Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	2.000.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Peralatan Pemasaran	8.100.000
002 - Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi	1.200.000
QMA - Data dan Informasi Publik	
001 - Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	1.000.000
002 - Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	1.000.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	14.500.000
UAB - Sistem Informasi Pemerintahan	
001 - Bursa Pasar Ikan	500.000
2358 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
PDC - Sertifikasi Produk	
001 - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang Diterbitkan	2.550.000
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001 - Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina	9.379.000
QDI - Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
051 - UPI Skala Menengah Besar yang Dibina	1.100.000
052 - Industri Pengolahan yang Dibina Oleh Daerah	2.660.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP	26.064.100
002 - Sarana Pengolahan Hasil KP	15.355.000
004 - Sarana Pengolahan Hasil KP (MP Korporasi)	1.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang Dibangun	10.700.000
5279 - Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001 - UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	2.750.000
002 - UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	1.750.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
002 - Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	850.000
003 - Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang Dibina Dalam Rangka Penataan Rantai Pasok	1.000.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Penyimpanan Produk KP	37.152.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002 - Sarana Distribusi Logistik Produk KP	4.320.000
003 - Sarana Distribusi Logistik Produk KP (MP Korporasi)	4.320.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
051 - Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.434.500
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) yang Diimplementasikan	2.237.500
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
003 - Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku 1000 Ton	2.050.000
2360 - Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH - Promosi	
001 - Promosi Usaha dan Investasi KP	3.000.000
QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001 - Lembaga Usaha KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.450.000
QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001 - Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	8.072.500
002 - UMKM KP yang Difasilitasi Pembiayaan Usaha	5.100.000
005 - UMKM KP yang Difasilitasi Kemitraan Usaha	2.701.000
06 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363 - Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	2.500.000
002 - Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	800.000
003 - Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	3.500.000
004 - Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wisata Bahari dan BMKT	750.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001 - Dokumen NSPK Jasa Kelautan	6.780.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Sarana Prasarana Wisata Bahari	6.700.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002 - Sarana Prasarana BMKT	1.700.000
003 - Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun	38.011.000
004 - Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun	2.315.000
RAI - Sarana Pengembangan Kawasan	
001 - Lahan Garam yang Difasilitasi	6.209.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	600.000
2366 - Perencanaan Ruang Laut	
PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007 - Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan KKPR	12.750.000
008 - Rekomendasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan dan Konfirmasi KKPR	4.800.000
009 - Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	7.270.000
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang-undangan	4.000.000
002 - Rekomendasi Kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan Diintegrasikan Kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3.000.000
003 - Rekomendasi Kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang Berupa PPKT Diintegrasikan Ke Dalam Rencana Tata Ruang KSN	3.500.000
007 - Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.350.000
008 - Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang- undangan	2.100.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001 - Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	2.100.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.263.000
002 - Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU)	187.100.000
UBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
003 - Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
004 - Pemerintah Daerah yang Dibina Untuk Pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	2.250.000
07 - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375 - Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	75.700.000
002 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan	27.265.225
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4.528.118
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.000.000
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	59.384.560
08 - Badan Karantakan Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989 - Pengendalian Mutu	
PDC - Sertifikasi Produk	
001 - Sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) Ruang Lingkup Produk Pada UPI	3.955.910
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001 - Hasil Perikanan di Wilayah RI yang Diawasi Mutunya	8.000.000
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001 - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem <i>Traceability</i>	3.000.000
002 - UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Sarana Pengujian Mutu	3.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana Pengujian Mutu	1.500.000
3990 - Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang Terakreditasi Di Laboratorium Acuan dan Penguji Sektor Kelautan Perikanan	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002 - Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter Uji yang Dihasilkan Laboratorium Acuan	2.500.000
PDD - Standarisasi Lembaga	
001 - Unit Kerja yang Menerapkan Standar Sistem Pengujian Kesehatan Ikan dan Mutu	1.500.000
002 - Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	1.500.000
003 - Unit Kerja yang Menerapkan Pengendalian Sistem Jaminan Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	700.000
004 - Unit Kerja Wilayah Perbatasan yang Telah Menerapkan Standar Pelayanan Mutu dan Karantina	500.000
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001 - Masyarakat yang Meningkatkan Pemahamannya Terhadap Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	13.500.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001 - Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar, Sistem dan Regulasi	7.800.000
HB - Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan	
3988 - Karantina Ikan	
PDC - Sertifikasi Produk	
001 - Sertifikat Karantina Ekspor, Impor Dan Domestik	12.500.000
PDF - Sertifikasi Lembaga	
001 - Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i>	5.000.000
QCE - Penanganan Perkara	
001 - Perkara Pelanggaran Peraturan Perkarantinaaan Ikan Yang Di Selesaikan	1.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Sarana Pengawasan Karantina	1.200.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana Pengawasan Karantina	1.000.000
02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
01 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
QGA - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001 - Pelabuhan Perikanan Di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional Sesuai Standar	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
02 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2365 - Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001 - Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.125.000
002 - Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	660.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
002 - NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225.000
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
001 - Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7.975.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	10.525.000
03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
01 - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH - Promosi	
001 - Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	35.180.900
02 - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2376 - Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.661.000
RAA - Sarana Bidang Pendidikan	
001 - Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	8.768.155
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.227.350
RBI - Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	
001 - Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9.328.500

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RBJ - Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
001 - Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19.837.165
SAC - Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	154.165.830
04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
01 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2365 - Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001 - NSPK Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilindungi dan Dikuatkan Kapasitasnya	1.200.000
003 - Masyarakat Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi dan Dilindungi Pemanfaatan Ruang Lautnya	1.600.000
05 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
01 - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350 - Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP	8.500.000
2352 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001 - Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhanannya	14.758.500
002 - Unit Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	1.678.000
02 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362 - Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	
PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001 - Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	17.998.297
002 - Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
003 - Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.698.743
PEC - Kerja Sama	
001 - Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	800.000
PEE - Kemitraan	
001 - Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	1.000.000
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001 - Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut	3.150.000
QEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	
001 - Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	3.500.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	4.487.338
REA - Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
002 - Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	6.574.728
003 - Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	1.950.000
004 - <i>Oceans for Prosperity Project</i> - Lautra	5.100.000
REB - Konservasi Jenis/Spesies	
001 - Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	5.160.000
002 - Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan	11.732.200
SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001 - Pengelola Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.250.000
UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001 - Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	630.000
4346 - Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001 - Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.000.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001 - Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	12.997.000
002 - Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terhadap Resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1.500.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QEG - Bantuan Peralatan/Sarana	
002 - Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2.000.000
RBH - Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	
001 - Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	2.000.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.800.000
002 - Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.475.000
REA - Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001 - Kawasan mangrove yang Direhabilitasi	5.700.000
002 - Vegetasi Pantai yang Ditanami Untuk Mitigasi Bencana	1.800.000
05 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
01 - Sekretariat Jenderal	
WA - Program Dukungan Manajemen	
2322 - Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama	
PEC - Kerja Sama	
001 - Kerja Sama Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan	7.500.000
02 - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350 - Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	
QHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001 - Operasi Kapal Pengawas	477.737.941
002 - Operasi Pesawat Patroli	50.000.000
003 - Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	15.700.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Kapal Pengawas	30.000.000
002 - <i>Speedboat</i> Pengawas	10.500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001 - Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	20.870.000
RCG - OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001 - Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	80.650.000
RDS - OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	6.162.350

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

**RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
PER PROGRAM DAN PER UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2024**

ANGGARAN TA 2024 (RP. 000)							
NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM					JUMLAH
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	SETJEN	-	-	-	-	659.661.999	659.661.999
2	ITJEN	-	-	-	-	87.254.343	87.254.343
3	DITJEN PT	474.304.744	-	-	-	472.235.347	946.540.091
4	DITJEN PB	826.669.396	-	-	-	396.501.011	1.223.170.407
5	DITJEN PSDKP	793.037.761	-	-	-	348.359.307	1.141.397.068
6	DITJEN PDS	80.297.500	159.199.000	-	-	147.402.651	386.899.151
7	DITJEN	331.088.000	-	105.603.306	-	220.946.727	657.638.033
8	BRSDMKP	1.000.000	-	-	372.294.839	1.098.289.272	1.471.584.111
9	BKIPM	27.400.000	63.255.910	-	-	438.963.324	529.619.234
JUMLAH		2.533.797.401	222.454.910	105.603.306	372.294.839	3.869.613.981	7.103.764.437

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana